

EDISI KHUSUS

# SEKILAS APBN

Kampus Merdeka  
INDONESIA JAYA

## Budget Issues Quick Response

### WACANA PENGHAPUSAN DAYA LISTRIK 450 VA, BAGAI BUAH SIMALAKAMA

Antoni, Padma Dewi Piranti, Paramita Permata Sari, Putri Berliana Aristy, Putu Ria Septiani

Dalam rapat panja bersama pemerintah pada 12 September silam, Ketua Banggar DPR RI melontarkan wacana untuk dilakukan kajian penghapusan 450 VA yang kemudian dialihkan bertahap ke 900 VA dan tetap bersubsidi. Wacana tersebut dilatarbelakangi kondisi PLN yang terus mengalami kelebihan pasokan listrik. Diproyeksi mencapai 6 gigawatt (GW) di tahun 2022 dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di tahun 2023, serta akan mencapai 41 GW di tahun 2030. Latar belakang lain yaitu beban subsidi dan kompensasi. Dalam outlook APBN 2022, subsidi dan kompensasi listrik tercatat sebesar Rp59,6 triliun. Namun, diproyeksikan membengkak hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp 131,02 triliun.

Secara tidak langsung, implementasi wacana ini akan memberikan dampak yang relatif signifikan bagi keuangan negara. Saat ini, sistem kontrak jual-beli dengan *Independent Power Producer* (IPP) sebagai produsen listrik swasta yang digunakan oleh PLN adalah skema take or pay. Sistem tersebut mewajibkan PLN tetap harus membayar sesuai kontrak untuk listrik yang terpakai maupun tidak. Penghapusan 450 VA akan berdampak pada pergeseran permintaan atau penggunaan listrik oleh masyarakat karena daya yang tersedia jauh lebih besar, yakni 900 VA.

Kenaikan permintaan ini akan dapat mengurangi kelebihan pasokan listrik PLN. Penurunan kelebihan pasokan tersebut pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perusahaan yang harus ditanggung PLN akibat penerapan skema take or pay dengan IPP. Lebih jauh lagi, penurunan beban biaya perusahaan tersebut juga akan berdampak pada besaran kompensasi yang ditanggung pemerintah di masa mendatang. Disisi lain, penghapusan 450 VA yang dialihkan menjadi 900 VA dapat menambah beban masyarakat. Penghapusan akan berimplikasi pada adanya perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang harus dibayarkan masyarakat. Apabila tidak dibarengi dengan penyesuaian besaran subsidi per rumah tangga sasaran, perubahan TDL akan menambah beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin.

Kemudian, penghapusan ini juga akan berpotensi berdampak negatif yakni memungkinkan adanya perilaku konsumsi berlebihan. Akibatnya, masyarakat tidak memanfaatkan energi dengan efisien dan efektif. Perilaku konsumsi berlebihan ini akan menjadi penghalang bagi pemerintah guna menciptakan green economy melalui Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) yang penekanan indikator keberhasilannya diukur dari efisiensi sumber daya. Hal ini juga menjadi tantangan proses pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang diinisiasi dan telah disetujui DPR RI sebagai RUU inisiatif pada Rapat paripurna DPR RI ke-25. Untuk itu, edukasi pentingnya efisiensi sumber daya energi listrik kepada masyarakat harus juga dilakukan apabila wacana penghapusan 450 VA menjadi pilihan kebijakam yang dieksekusi. Jika kebijakan penghapusan tetap dilaksanakan, sebaiknya pemerintah mendorong pemakaian listrik pada industri UMKM. Hal ini dibutuhkan agar kelebihan pasokan PLN dapat teratasi, namun penggunaanya diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan memberikan sumbangsih besar pada perekonomian nasional, dibanding hanya sebatas konsumsi rumah tangga belaka.

